

BPP

BADAN PENGARAH PERCEPATAN

KELOMPOK KERJA (POKJA) PAPUA CERDAS (PENDIDIKAN)

LAPORAN BULANAN (MONTHLY REPORT) MEI 2026



RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)
PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2025

8,07%

Sumber Data: BPS



ANGKA PARTISIPASI MURNI
SMA-SMK DAN SEDERAJAT (APM)
PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2025

57,63%

Sumber Data: BPS



ANGKA ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
PROVINSI PAPUA BARAT / MEI 2026

29,575 ORANG

Sumber Data: Dashboard ATS Kemdikdasman RI



PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT



Papua Cerdas, Papua

Indonesia Maju!

BPP

BADAN PENGARAH PERCEPATAN

KELOMPOK KERJA (POKJA) PAPUA CERDAS (PENDIDIKAN)

LAPORAN BULANAN (MONTHLY REPORT) MEI 2026

MUSRENBANG OTSUS PEMERINTAH KABUPATEN DAN PROVINSI PAPUA BARAT

KAB. TELUK BINTUNI



KAB. MANOKWARI



TELUK WONDAMA



KAB. MANOKWARI SELATAN



PROVINSI PAPUA BARAT



PROVINSI PAPUA BARAT



PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT



Papua Cerdas, Papua Maju, Indonesia Maju!

MONTHLY REPORT MUSRENBANG OTSUS KABUPATEN DAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

PROGRAM PAPUA CERDAS – BP3OKP RI PAPUA BARAT

1 PENGUATAN AKSES PENDIDIKAN OAP



Sasaran Program:

- Meningkatkan akses pendidikan OAP melalui pendidikan inklusif, beasiswa afirmasi, dan transportasi sekolah.

Permasalahan:

- Masih tingginya angka putus sekolah dan keterbatasan akses di wilayah terpencil.
- Belum terprogramnya satuan pendidikan prioritas.

Rekomendasi Strategis:

- Optimalisasi dana Otsus untuk pendidikan afirmasi, asrama siswa, dan transportasi pendidikan daerah terpencil.

2 PEMERATAAN INFRASTRUKTUR



Sasaran Program:

- Fasilitas pembangunan dan rehabilitasi sekolah yang layak, aman, dan berkualitas.

Permasalahan:

- Masih terdapat sekolah rusak serta keterbatasan ruang kelas, laboratorium, listrik, dan internet.

Rekomendasi Strategis:

- Percepatan rehabilitasi sekolah serta pembangunan sekolah digital dan fasilitas pembelajaran berbasis TIK.

3 PENGUATAN SDM GURU



Sasaran Program:

- Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan secara merata.

Permasalahan:

- Distribusi guru belum merata dan masih kurangnya tenaga pendidik kompeten di daerah pedalaman.

Rekomendasi Strategis:

- Rekrutmen guru afirmasi, insentif khusus guru pedalaman, dan pelatihan kompetensi berkelanjutan.

4 PENGUATAN SEKOLAH



Sasaran Program:

- Meningkatkan kualitas pembelajaran serta kemampuan literasi dan numerasi siswa.

Permasalahan:

- Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa serta minimnya bahan ajar kontekstual.

Rekomendasi Strategis:

- Pengembangan modul berbasis budaya lokal dan peningkatan pelatihan literasi-numerasi guru.

5 PENGUATAN PENDIDIKAN VOKASI & KEMITRAAN



Sasaran Program:

- Mengembangkan pendidikan vokasi berbasis potensi lokal dan keterhubungan dengan DUDI.

Permasalahan:

- Keterbatasan SMK berbasis potensi daerah dan lemahnya keterhubungan dengan dunia usaha dan industri.

Rekomendasi Strategis:

- Penguatan teaching factory, pengembangan kurikulum vokasi lokal, dan kolaborasi dengan dunia usaha dan industri (DUDI).

6 TRANSFORMASI DIGITAL PENDIDIKAN



Sasaran Program:

- Mendorong transformasi digital pendidikan melalui penguatan perangkat TIK dan internet sekolah.

Permasalahan:

- Keterbatasan perangkat TIK dan akses internet sekolah.

Rekomendasi Strategis:

- Pengadaan perangkat digital sekolah, perluasan internet distrik, dan pelatihan literasi digital.

7 BUDAYA PAPUA & KARAKTER SISWA



Sasaran Program:

- Melestarikan budaya Papua melalui penguatan pendidikan karakter dan muatan lokal budaya Papua.

Permasalahan:

- Muatan lokal budaya Papua belum terintegrasi optimal dalam pembelajaran.

Rekomendasi Strategis:

- Integrasi budaya Papua dalam kurikulum serta revitalisasi kegiatan budaya dan nilai adat.

8 TATA KELOLA & DATA PENDIDIKAN



Sasaran Program:

- Mewujudkan tata kelola program pendidikan Otsus yang efektif, akuntabel, dan berbasis data.

Permasalahan:

- Sinkronisasi program pusat dan daerah belum optimal serta monitoring program masih lemah.

Rekomendasi Strategis:

- Pengembangan sistem monitoring terpadu, digitalisasi data pendidikan, dan evaluasi program secara berkala.

9 SINKRONISASI PROGRAM & DESK MUSRENBANG



Sasaran Program:

- Meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan pendidikan.

Permasalahan:

- Kakupaten Teluk Wondama, Manokwari Selatan, Manokwari, Fakfak, dan Kaimana belum melaksanakan desk Musrenbang sesuai pedoman.

Rekomendasi Strategis:

- Pelaksanaan desk Musrenbang sesuai pedoman melalui asistansi teknis, supervisi, dan penguatan kapasitas daerah.

10 PERENCANAAN TERINTEGRASI & BERKELANJUTAN



Sasaran Program:

- Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan Papua Barat yang selaras, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Permasalahan:

- Koordinasi lintas sektor dan integrasi data perencanaan pembangunan masih terbatas.

Rekomendasi Strategis:

- Penguatan koordinasi pusat-provinsi-kabupaten serta optimalisasi sistem perencanaan berbasis data digital.

CATATAN UMUM MUSRENBANG OTSUS PAPUA BARAT TAHUN 2026

- 1 Kabupaten Manokwari, Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Manokwari Selatan belum melaksanakan Desk Musrenbang Otsus 2026 sebagaimana yang disyaratkan. Sedangkan Kabupaten Teluk Bintuni dan Pegunungan Arfak sudah melaksanakan Desk Musrenbang Otsus Tahun 2026 sesuai yang disyaratkan namun belum signifikan sebagaimana yang diharapkan. Adapun, Desk Musrenbang Otsus Pemerintah Provinsi Papua Barat sangat terbaik dalam melaksanakan Desk Musrenbang Otsus Tahun 2026 sesuai pedoman pelaksanaan musrenbang otsus.
- 2 Terdapat 5 (lima) kabupaten di Papua Barat yang merencanakan mulai tahun 2027 melaksanakan program prioritas Sekolah Sepanjang Hari (SSH) yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, dan Kabupaten Kaimana.

KABUPATEN SASARAN PROGRAM PRIORITAS SSH MULAI TAHUN 2027



PEGUNUNGAN ARFAK



TELUK BINTUNI



MANOKWARI SELATAN



TELUK WONDAMA



KAIMANA

DAMPAK YANG DIHARAPKAN



Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan bagi OAP



Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan



Mengembangkan potensi lokal dan daya saing Papua



Mewujudkan digitalisasi pendidikan yang merata



Tata kelola program yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan



BERSINERGI

Membangun kolaborasi untuk kemajuan Papua



BERKOMITMEN

Berkomitmen pada pendidikan berkualitas



BERINOVASI

Berinovasi untuk solusi yang berkelanjutan



BERDAMPAK

Berdampak nyata bagi generasi Papua

"Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Maju"



IMPLEMENTASI MUSRENBANG OTSUS PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAN KABUPATEN TERKAIT PROGRAM PAPAN CERDAS

TAHUN 2026



Papua Cerdas
Papua Produktif
Papua Maju



Akses Pendidikan
Merata & Bermutu



Guru
Kompeten



Pembelajaran
Berkualitas



Transformasi Digital
Pendidikan



Budaya Papua
Lestari



Tata Kelola Program
Efektif & Akuntabel

1. SASARAN PROGRAM

- Meningkatkan akses pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP) melalui bantuan pendidikan, beasiswa afirmasi, dan transportasi sekolah.
- Mewujudkan pemerataan infrastruktur pendidikan yang layak dan berkualitas melalui program prioritas RAPP Papua Cerdas periode 2025-2029 antara lain sekolah sepanjang hari (SSH), sekolah berpola asrama, sekolah terbuka, dan akselerasi akses mutu layanan pendidikan.
- Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan daerah 3T.
- Meningkatkan kualitas pembelajaran serta kemampuan literasi dan numerasi siswa.
- Mengembangkan pendidikan vokasi berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
- Mendorong transformasi digital pendidikan melalui penguatan perangkat TIK dan internet sekolah.
- Melestarikan budaya Papua melalui penguatan pendidikan karakter dan muatan lokal budaya Papua.
- Mewujudkan tata kelola program pendidikan Otsus yang efektif, akuntabel, dan berbasis data.
- Meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan pendidikan Tahun 2027 melalui desk Musrenbang.
- Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan Papua Barat yang selaras, terintegrasi, dan berkelanjutan.

2. PERMASALAHAN

- Tingginya angka putus sekolah dan keterbatasan akses pendidikan di wilayah terpencil, serta belum terprogramnya satuan pendidikan prioritas.
- Masih terdapat sekolah rusak serta keterbatasan ruang kelas, laboratorium, listrik, dan internet.
- Distribusi guru belum merata dan masih kurangnya tenaga pendidik kompeten di daerah pedalaman.
- Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa serta minimnya bahan ajar kontekstual.
- Keterbatasan SMK berbasis potensi daerah dan lemahnya keterhubungan dengan dunia usaha dan industri.
- Keterbatasan perangkat TIK dan akses internet sekolah.
- Muatan lokal budaya Papua belum terintegrasi optimal dalam pembelajaran.
- Sinkronisasi program pusat dan daerah belum optimal serta monitoring program masih lemah.
- Kabupaten Teluk Wondama, Manokwari Selatan, Manokwari, Fakfak, dan Kaimana belum melaksanakan desk Musrenbang sesuai pedoman.
- Koordinasi lintas sektor dan integrasi data perencanaan pembangunan masih terbatas.

3. REKOMENDASI STRATEGIS

- Optimalisasi dana Otsus untuk pendidikan afirmasi, asrama siswa, dan transportasi pendidikan daerah terpencil.
- Percepatan rehabilitasi sekolah serta pembangunan sekolah digital dan fasilitas pembelajaran berbasis TIK.
- Rekrutmen guru afirmasi, pemberian insentif khusus guru pedalaman, dan pelatihan kompetensi berkelanjutan.
- Pengembangan modul pembelajaran berbasis budaya lokal dan peningkatan pelatihan literasi-numerasi guru.
- Penguatan teaching factory, pengembangan kurikulum vokasi lokal, dan kolaborasi dengan dunia usaha dan industri (DUDI).
- Pengadaan perangkat digital sekolah, perluasan internet distrik, dan pelatihan literasi digital.
- Integrasi budaya Papua dalam kurikulum serta revitalisasi kegiatan budaya dan nilai adat.
- Pengembangan sistem monitoring terpadu, digitalisasi data pendidikan, dan evaluasi program secara berkala.
- Pelaksanaan desk Musrenbang sesuai pedoman melalui asistensi teknis, supervisi, dan penguatan kapasitas daerah.
- Penguatan koordinasi pusat-provinsi-kabupaten serta optimalisasi sistem perencanaan berbasis data digital.

PETA PELAKSANAAN DESK MUSRENBANG OTSUS 2026



CATATAN UMUM MUSRENBANG OTSUS PAPUA BARAT TAHUN 2026

- Kabupaten Manokwari, Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Manokwari Selatan Belum melaksanakan Desk Musrenbang Otsus 2026 sebagaimana yang disyaratkan. Sedangkan Kabupaten Teluk Bintuni dan Pegunungan Arfak sudah melaksanakan Desk Musrenbang Otsus tahun 2026 sesuai yang disyaratkan namun belum signifikan sebagaimana yang diharapkan. Adapun, Desk Musrenbang Otsus Pemerintah Provinsi Papua Barat sangat terbaik dalam melaksanakan Desk Musrenbang Otsus tahun 2026 sesuai pedoman pelaksanaan musrenbang otsus.
- Terdapat 5 (lima) kabupaten di Papua Barat yang merencanakan mulai tahun 2027 melaksanakan program prioritas Sekolah sepanjang Hari (SSH) yakni Kabupaten Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, dan kabupaten Kaimana,

PROGRAM PRIORITAS 2025-2029 PAPAN CERDAS



Sekolah Sepanjang Hari (SSH)



Sekolah Berpola Asrama



Sekolah Terbuka



Akselerasi Akses & Mutu Layanan Pendidikan



Afirmasi & Beasiswa



Infrastruktur Pendidikan



Guru & Tenaga Kependidikan



Literasi & Numerasi



Vokasi & Potensi Lokal



Digitalisasi Pendidikan



Budaya & Karakter Papua



Tata Kelola & Data Pendidikan





BPP

BADAN PENGARAH PAPUA

TERIMA KASIH

Atas perhatian, dukungan, kerja sama,
dan komitmen kita untuk pendidikan yang lebih
berkualitas di **Tanah Papua**.



*Papua Cerdas, Papua Maju,
Indonesia Maju!*



BERSINERGI
Membangun kolaborasi
untuk kemajuan Papua



BERKOMITMEN
Berkomitmen pada
pendidikan berkualitas



BERINOVASI
Berinovasi untuk solusi
yang berkelanjutan



BERDAMPAK
Berdampak nyata bagi
generasi Papua

Laporan Bulanan Pokja Polhukam

MEI 2026



Permasalahan

1. Bahwa Musrenbang RKPD & OTSUS Tahun 2026 yang digelar tanggal 4 Mei 2026 oleh Pemda Kabupaten Manokwari Selatan belum didasarkan pada sistem dan prosedur musrenbang yang diatur dalam sistem perencanaan nasional dan daerah.
2. Musrenbang tidak pernah dilakukan secara berjenjang guna mengawal aspirasi masyarakat dari Kampung, Distrik Kabupaten, dan Provinsi sampai Pusat.
3. DPRK dan DPRD tidak pernah mendampingi dan mengawal proses RKPD dan musrenbang tahunan di kabupaten Manokwari Selatan

Kegiatan

1. Dialog interaktif dengan Narasumber dari BP3OKP dengan judul pengawasan pelaksanaan Otsus dengan sistem interoperabilitas disampaikan Ibu Irene Manibuy, S.H, M.Kn ketua BP3OKP, dari kabupaten Manokwari Selatan dengan judul materi visi, misi dan program pembangunan kabupaten. Manokwari Selatan tahun 2027 oleh Bernard Mandacan, S.IP. Bupati Manokwari Selatan didampingi wakil bupati dan Kepala Bappeda Manokwari Selatan
2. Narasumber pusat, pejabat eselon II dari Kemendagri, Kemenkeu, dan KPN/Bappenas turut berpartisipasi dalam memberikan pembekalan bagi peserta musrenbang RKPD & OTSUS tentang tata kelola pemanfaatan dana Otsus dan pertanggung jawaban.

Rekomendasi

1. Diharapkan setiap musrenbang RKPD & OTSUS di semua tingkat pemerintahan diikuti anggota DPRD dan DPRD agar dapat mengakomodir aspirasi rakyat secara baik sampai pada penetapan APBD di Kabupaten dan Provinsi.
2. Bupati Manokwari Selatan harus tegas dan serius mengarahkan Bappeda untuk mengikuti tata aturan dan mekanisme musrenbang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan



Permasalahan

1. Bahwa Musrenbang RKPD & OTSUS Tahun 2026 yang digelar tanggal 4 Mei 2026 oleh Pemda Kabupaten Manokwari belum didasarkan pada sistem dan prosedur musrenbang yang diatur dalam sistem perencanaan nasional dan daerah.
2. Musrenbang tidak pernah dilakukan secara berjenjang guna mengawal aspirasi masyarakat dari Kampung, Distrik Kabupaten, dan Provinsi sampai Pusat.
3. DPRK dan DPRP tidak pernah mendampingi dan mengawal proses RKPD dan musrenbang tahunan di kabupaten Manokwari

Kegiatan

1. Dialog interaktif dengan Narasumber dari BP3OKP dengan judul pengawasan pelaksanaan Otsus dengan sistem interoperabilitas disampaikan Ibu Irene Manibuy, S.H, M.Kn ketua BP3OKP, dari kabupaten Manokwari dengan judul materi visi, misi dan program pembangunan kabupaten. Manokwari tahun 2027 oleh Hermus Indouw, Bupati Manokwari didampingi wakil bupati dan Kepala Bappeda Manokwari
2. Narasumber pusat, pejabat eselon II dari Kemendagri, Kemenkeu, dan KPN/Bappenas turut berpartisipasi dalam memberikan pembekalan bagi peserta musrenbang RKPD & OTSUS tentang tata kelola pemanfaatan dana Otsus dan pertanggung jawaban.

Rekomendasi

1. Diharapkan setiap musrenbang RKPD & OTSUS di semua tingkat pemerintahan diikuti anggota DPRP dan DPRK agar dapat mengakomodir aspirasi rakyat secara baik sampai pada penetapan APBD di Kabupaten dan Provinsi.
2. Bupati Manokwari harus tegas dan serius mengarahkan Bappeda untuk mengikuti tata aturan dan mekanisme musrenbang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan



Permasalahan

1. Peran kelembagaan DPRP, DPRK dan kelembagaan masyarakat dalam rangka mendukung tata kelola otonomi khusus di Papua Barat masih sangat minim.
2. peran kelembagaan DPRP, DPRK dan kelembagaan masyarakat dalam rangka pengawasan penerimaan otonomi khusus belum diatur dengan produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.



Kegiatan

1. Melakukan pembekalan peningkatan kualitas anggota DPRP dan DPRK serta lembaga kemasyarakatan dalam rangka tata kelola pelaksanaan Otonomi Khusus dan sistem pengawasan otonomi khusus dengan pendekatan sistem operabilitas.
2. Materi pembekalan disampaikan oleh Ketua BP3OKP RI Perwakilan Papua Barat ibu Irene Manibuy, S.H, M.Kn, Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si yang di dampingi kepala bidang otonomi khusus Bappeda Provinsi Papua Barat.
3. Pemateri dari Jakarta (Pusat) masing-masing : pejabat Eselon II dari Kementerian Dalam Negeri, pejabat eselon II dari Kementerian Keuangan dan Pejabat Eselon II dari BPN/ Bappenas
4. Dialog Interaktif antara pemateri dan audiens berdampak positif karna materi yang disajikan merupakan materi baru yang belum pernah diperoleh anggota DPRP dan anggota DPRK serta komponen lembaga kemasyarakatan terutama asosiasi pengusaha Orang Asli Papua (OAP)

Rekomendasi

Dalam dialog tersebut ada beberapa pokok pikiran dari peserta diskusi berupa saran/ usul, antara lain:

- 1.) diharapkan adanya peningkatan kualitas bagi anggota DPRP dan DPRK serta lembaga kemasyarakatan secara periodik agar mereka dapat memahami tata kelola otonomi khusus dan sistem pengawasan dengan menggunakan metode pendekatan interoperabilitas.
- 2.) dipandang perlu adanya produk hukum daerah (perdasus/perdasi) yang akan dijabarkan dalam Perda Kabupaten/Kota agar anggota DPRP, DPRK dan kelembagaan masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan penggunaan dana otsus dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara komprehensif dan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara (efisien, efektif, transparan dan akuntabel)



Permasalahan

1. Proses musrenbang yang idealnya dilakukan dari kampung ketingkat distrik sampai kabupaten/ kota untuk dibahas dalam musrenbang provinsi masih terdapat beberapa kabupaten yang belum melakukan musrenbangnya sesuai sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam UU NO 25 Tahun 2004.
2. Belum adanya sinergitas sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN
3. Sistem pelaporan dari pemerintah daerah kabupaten tentang RPJMD yang seharusnya disampaikan kepada BP3OKP-RI perwakilan Provinsi Papua Barat sampai saat ini belum ada realisasinya

Kegiatan

1. Arahan umum gubernur Provinsi Papua Barat, tentang kebijakan pembangunan daerah, program kerja, visi dan misi pemerintah daerah.
2. Materi pertahanan dan keamanan daerah dari Pangdam XVIII Kasuari.
3. Kebijakan teknis percepatan pembangunan otonomi khusus oleh ketua BP3OKP-RI Provinsi Papua Barat ibu Irene Manibuy.
4. Materi substantif dari kementerian dalam negeri, kementerian keuangan, kementerian BPN/Bappenas, yang terkait dengan tata Kelola pelaksanaan otonomi khusus dan system pengawasan dengan menggunakan pendekatan system operabilitas. Dalam proses musyawarah dimaksud diwarnai dengan dialog antar peserta musrenbang dengan seluruh pemateri, dan audiens mendapat penejelasan dari kementerian Lembaga pusat, pemerintah provinsi Papua Barat, pangdam XVIII Kasuari Papua Barat dan BP3OKP-RI provinsi Papua Barat sehingga suasana musyawarah dapat berjalan sesuai dengan jadwal acara yang ditetapkan panitia penyelenggara.
5. Desk Pokja Papua sehat, cerdas dan produktif, dimana pokja Papua produktif dibagi menjadi 3 kelompok yang berisikan sector ekonomi
6. Pendampingan pokja Papua produktif dimulai dari jam 13.35-00.45 WIT, untuk mendapatkan persetujuan bersama antara OPD teknis dan bappeda, tentang kesepakatan jumlah anggaran bagi masing-masing OPD teknis.

Rekomendasi

1. Diharapkan dalam pelaksanaan musrenbang tahunan setiap OPD dapat mengikuti tata cara musrenbang yang ideal sebagaimana diatur di dalam UU No. 25 tahun 2004.
2. Diperlukan adanya sinergitas yang dilakukan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan koordinasi antar Lembaga, OPD provinsi dan kabupaten agar memudahkan system pengawasan anggaran
3. Diharapkan agar setiap akhir tahun anggaran OPD/instansi teknis dapat melaporkan perkembangan pelaksanaan otonomi khusus dalam bentuk pertanggungjawaban anggaran penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBD, guna menghindari kebocoran atau penyalahgunaan keuangan negara.



Permasalahan

Pelaksanaan program sekolah sepanjang hari di Provinsi Papua Barat belum sepenuhnya dilakukan oleh kabupaten di provinsi Papua Barat walaupun telah dikemukakan dalam setiap pelaksanaan musrenbang dan pertemuan antar universitas Papua, BP3OKP dan instansi teknis (dinas Pendidikan dan kebudayaan)



Kegiatan

1. Pertemuan awal antar tim UNIPA yang dipimpin oleh Dr. Agus sumule bersama perwakilan BP3OKP dari pokja Papua cerdas (Drs. Arius Mofu M.Pd) dan Papua polhukam (Dr. Ismail Sirfefa S.sos M.H) mendiskusikan rancangan materi sosialisasi sekolah sepanjang hari yang akan disampaikan di setiap kabupaten.
2. Sosialisasi yang akan dilakukan oleh UNIPA dan BP3OKP direncanakan meliputi semua kabupaten yang akan dipimpin langsung oleh rector UNIPA Prof.Dr. Hugo Warami S.Pd M.Hum.
3. Kesepakatan bersama antar UNIPA dan BP3OKP agar setiap hari jumat dilakukan rapat koordinasi untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kebijakan pelaksanaan sekolah sepanjang hari di Provinsi Papua Barat.

Rekomendasi

1. Disarankan agar setiap pertemuan yang dilaksanakan pada hari jumat setiap bulan ditunjang oleh BP3OKP melalui kesekretariatan bidang administratif dan substansi
2. Mengingat sampai saat ini kebijakan program sekolah sepanjang hari belum dilakukan di setiap kabupaten/kota maka diharapkan pemerintah daerah kabupaten dapat merespon pelaksanaannya dengan menyediakan anggaran yang ditetapkan dalam APBD kabupaten.
3. Diharapkan adanya peraturan kepada daerah (peraturan gubernur dan bupati) tentang pelaksanaan sekolah sepanjang hari di daerah.



Permasalahan

1. Persepsi proses belajar mengajar bagi guru dan siswa serta masyarakat untuk menggunakan noken belum ditetapkan dengan peraturan daerah di setiap kabupaten.
2. Eksistensi noken sebagai karya yang dihasilkan masyarakat untuk mengangkat nilai-nilai budaya bangsa yang telah diwajibkan oleh setiap ASN untuk menggunakannya dalam hari-hari tertentu yang telah ditetapkan dengan perdasu provinsi Papua Barat perlu dilakukan peninjauan kembali isi perdasu tersebut, karena sifatnya belum mengikat perilaku ASN untuk mematuhi peraturan tersebut

Kegiatan

1. Noken dijadikan asset budaya yang diakomodir dalam kokorikuler merajut kearifan local menguatkan karakter, menginspirasi pembelajaran bagi guru, murid, dan orang tua wali.
2. Materi seminar diberikan oleh para ahli, pakar dan aktivis dari balai budaya provinsi Papua Barat daya 1 orang, dari UNIPA 1 orang, dari LSM yang medekusi dan mengadvokasi budaya Papua pejabat eselon 2 dari balai pelestarian budaya nasional dan kepala balai Pendidikan dan kebudayaan provinsi Papua Barat.
3. Tambahan materi dari BP3OKP RI perwakilan Provinsi Papua Barat yang disampaikan anggota pokja Papua Cerdas Drs. Arius Mofu M.Pd tentang kebijakan Papua Cerdas dalam pelaksanaan otonomi khusus

Rekomendasi

Diharapkan adanya peraturan daerah kabupaten untuk mewajibkan setiap ASN untuk memakai noken pada setiap hari kerja dan juga kepada guru dan siswa sebagai trigger untuk meningkatkan produksi noken yang berimplikasi terhadap pendapatan ibu-ibu atau perempuan, diharapkan adanya revisi perdasi tentang noken karena dalam pelaksanaannya belum efektif.



Permasalahan

1. Proyek Strategi Nasional (PSN) dinilai telah mengancam dan menghancurkan ruang hidup orang asli Papua, menghilangkan ekosistem dan habitat bagi flora dan fauna serta mengurangi daya dukung lingkungan.
2. Deforestasi hutan yang berlebihan dan penggusuran tanah yang tidak beretika dan bermoral telah menghilangkan sumber penghidupan dan kehidupan masyarakat seperti kolam ikan, rawa, kali tempat hidupnya hewan, tumbuhan obat serta merubah bentang alam, ekoregion yang dipercayai masyarakat adat secara religi adalah sakral.
3. Proyek strategi nasional tidak prosedural dan tidak menghormati dan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dalam arti memberikan pengakuan dan perlindungan kepada pemilik hak Ulayat atas tanah adat dan hutan adat.
4. Traumatik yang berkepanjangan atas hak-hak ulayat masyarakat adat yang tidak pernah dikoordinasikan, didialogkan secara santun dan baik membuat masyarakat marah dan mengekspresikan proteksi hutan adatnya dengan mengangkat salib merah sebagai tanda memohon pertolongan Tuhan.

Kegiatan

1. Kegiatan musyawarah dewan adat setanah Papua dihadiri Wakil gubernur prov. Papua barat, Kapolda, pangdam, ketua MRP, Ketua DPRP dan Pejabat dari Pemda Provinsi Papua Barat, Bupati Kab Teluk Wondama dan Jajarannya, Ketua Dewan Adat se- Tanah Papua. Semua peserta terlibat langsung dalam proses dan tahapan musyawarah dan sepakat terhadap keputusan2 dewan adat tersebut.
2. Dalam Pleno XIX Musyawarah Dewan Adat se- Tanah Papua menolak dengan tegas Kegiatan Proyek Strategi Nasional (PSN) dan Pendekatan Militerisasi di Tanah Papua. Karena sangat bertentangan dengan pasal 63 UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dan Pasal 64 ayat (1).
3. Dalam musyawarah adat menegaskan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak masyarakat adat bukan sebaliknya melakukan pencocokan terhadap tanah adat dan hutan adat orang asli Papua

Rekomendasi

1. Pembangunan di Provinsi Papua wajib hukumnya berpedoman prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
2. Agar kegiatan PSN yang telah merusak dan menghancurkan tanah adat, dan hutan adat dipandang perlu melakukan reboisasi, restorasi dan rehabilitasi guna keseimbangan hutan dan sumberdaya alam walaupun melalui proses yang lambat (evolusioner), karena masih ada generasi Papua.
3. Disarankan agar ada dialog nasional antara pemerintah pusat dengan masyarakat adat untuk membicarakan persoalan-persoalan yang terjadi selama ini di tanah Papua



19-20 MEI 2026

Musyawarah Dewan Adat se- Tanah Papua
di Wasior Kab. Teluk Wondama



Permasalahan

1. Tingkat kriminalitas pemuda di Kaimana cukup tinggi yang ditandai kenakalan remaja, kecurian, mabuk-mabukan yang tidak terkendali menjadi permasalahan hukum yang serius.
2. Kesadaran hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat belum maksimal dan ditangan secara koordinatif antar lembaga pemerintah bersama stakeholders.

Kegiatan

1. Pertandingan Turnamen Futsal dalam rangka Kapolres Cup merebut Piala Kapolres ke- VI yang diikuti 45 Putra yang pada umumnya diikuti generasi muda Kaimana dan tim futsal dari kabupaten tetangga seperti Mimika, Fakfak, Tual dan Dobo.
2. Turnamen Futsal Tim Putri berlaga di Piala Ketua Bhayangkari Cup II yang diikuti 13 Tim Putri.
3. Kegiatan Strategis ini dilakukan pihak polres bekerjasama dengan Pemda setempat sebagai Trigger untuk merangsang pemuda berpartisipasi dalam pertandingan dan meninggalkan perilaku negatif yang mengganggu ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan ikut bersama pemerintah daerah dan aparat menjaga stabilitas keamanan daerah.

Rekomendasi

1. Terus dilakukan pembinaan generasi muda sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan kedepan melalui berbagai aktivitas kepemudaan agar kelak menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara serta taat hukum
2. Dipandang perlu adanya edukasi hukum, pembinaan karakter dan pemberdayaan pemuda dalam berbagai dimensi kehidupan terutama mereka yang putus sekolah agar mau berjuang mengembangkan dirinya guna menghindari diri dari kenakalan, kecurian, keonaran yang harus dilaksanakan secara terpadu, inklusif dan berkelanjutan.



Pokja Polhukam

MEI 2026

LAPORAN BULANAN POKJA PAPUA SEHAT MEI 2026



1 ASPEK PERENCANAAN

Sinkronisasi program pembangunan daerah dengan RIPPP, RAPP 2025–2029, dan kebijakan Otonomi Khusus Papua.

P.1 Musrenbang Otsus & RKPD Kab. Manokwari Selatan TA 2027

📅 4 Mei 2026 📍 GSG Jemaat Petrus Abreso, Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat.

Musrenbang Otsus & RKPD TA 2027. Bupati Bernard Mandacan menegaskan program OPD harus memberi manfaat nyata, mempertimbangkan jangkauan, keamanan, efektivitas, dan dampak cakupan — terutama bagi yang terisolasi, tidak berpengetahuan, dan miskin.



🗣️ **BP3OKP:** Irene Manibuy memperkenalkan Strategi Trisula Pembangunan: Papua Sehat (Mobile Health, Puskesmas, stunting), Papua Cerdas (SSH, Sekolah Berpola Asrama dan Sekolah Terbuka), Papua Produktif (UMKM, pasar lokal). Ditegaskan: **seluruh program WAJIB berpedoman RIPPP 2022–2041 dan RAPP 2025–2029, serta berdampak langsung kepada masyarakat. "Tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan pelayanan dasar."**

✅ **Capaian:** Trisula Pembangunan diadopsi sebagai kerangka prioritas Musrenbang Manokwari Selatan; kesepakatan strategis dituangkan dalam berita acara RAP Otsus 2027.

P.2 Musrenbang Otsus & RKPD Kabupaten Manokwari TA 2027

📅 6 Mei 2026 📍 Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari, Papua Barat

Forum lintas sektor untuk mempertajam sasaran RKPD 2027 Kab. Manokwari. Membahas: penataan kawasan Beranda Terdepan Kota Manokwari, ketahanan pangan (cetak sawah >1.000 ha), Pasar Sanggeng-Wosi, Sentral UMKM Terpadu. Dana Otsus diarahkan ke 4 bidang utama: pendidikan, kesehatan, ekonomi OAP, dan infrastruktur.



🗣️ **BP3OKP:** BP3OKP menekankan: "Dana Otsus bukan sekadar anggaran rutin — melainkan instrumen keberpihakan negara kepada masyarakat Papua." Irene Manibuy mendorong perubahan paradigma: dari mengejar serapan anggaran menjadi memastikan program memberi dampak nyata bagi OAP.

✅ **Capaian:** Paradigma pengelolaan anggaran bergeser: komitmen bersama pemangku kepentingan untuk mengutamakan dampak OAP di atas serapan formal.

1 ASPEK PERENCANAAN

Sinkronisasi program pembangunan daerah dengan RIPPP, RAPP 2025–2029, dan kebijakan Otonomi Khusus Papua.

P.3 Musrenbang Otsus & RKPD Provinsi Papua Barat TA 2027

📅 7 Mei 2026 📍 Hotel Aston Niu, Manokwari

Musrenbang Provinsi dipimpin Gubernur, dihadiri Wakil Menteri Keuangan, Bappenas, Mendagri, seluruh Bupati. Gubernur menetapkan 7 prioritas RKPD 2027. Bappenas: Papua Barat harus tumbuh 6,8–8,3% di 2027 menuju target nasional 8% di 2029. Gubernur buka 1.500 formasi khusus OAP dan 1.800 honorer PNS.



🎯 **BP3OKP:** BP3OKP hadir sebagai mitra strategis perencanaan provinsi. Ketua BP3OKP menegaskan seluruh program Otsus harus berdampak terukur bagi OAP. BP3OKP mendorong OPD pertambahan lebih proaktif dalam perizinan agar manfaat SDA mengalir merata — bukan hanya ke investor besar.

✅ **Capaian:** IPM Papua Barat naik ke 68,48 (+0,79); kemiskinan turun 1% (21,66%→20,66%); 7 arah prioritas RKPD 2027 ditetapkan; target pertumbuhan 6,8–8,3% disepakati.

P.4 Desk Musrenbang Otsus & RKPD Provinsi — Papua Sehat

📅 8 Mei 2026 📍 Hotel Aston Niu, Manokwari

Pokja Papua Sehat mempresentasikan konsep baru dalam sesi desk Musrenbang Provinsi. Mengidentifikasi masalah kritis RKA: program disusun per bidang tanpa integrasi, puskesmas bukan basis data, terlalu administratif, tidak berbasis indikator. Akibat: 'Uang habis – indikator tidak naik signifikan.'



🎯 **BP3OKP:** BP3OKP menginisiasi revolusi perencanaan kesehatan: "Satu Sistem Kesehatan Papua Barat" dengan One Papua Barat Health Planning. Setiap program WAJIB menjawab: indikator apa, lokasi mana, siapa penanggung jawab, output, dan dampak. Puskesmas harus menjadi Pusat Komando Kesehatan Kampung — bukan hanya tempat berobat.

✅ **Capaian:** Konsep "Satu Sistem Kesehatan Papua Barat" resmi diusulkan ke Musrenbang Provinsi; 4 Program Wajib ditetapkan: Eliminasi ATM-K, PTM, KIA, dan Akses Daerah Sulit.


1 ASPEK PERENCANAAN

Sinkronisasi program pembangunan daerah dengan RIPP, RAPP 2025–2029, dan kebijakan Otonomi Khusus Papua.

P.5 Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua — 12 Kesepakatan Timika

 11–12 Mei 2026  Hotel Horison Diana, Timika, Papua Tengah

Forum menghasilkan 12 Kesepakatan Timika — ditandatangani 6 Gubernur/Wagub se-Tanah Papua. Poin kunci: (1) Komitmen Asta Cita-Indonesia Emas 2045; (2) Keberlanjutan KEK Sorong, Kawasan Industri Bintuni-Fakfak-Timika, Pariwisata Raja Ampat, Trans Papua, Tol Udara; (3) DOB selesai paling lambat 2028; (4) Tim Taskforce Tata Kelola Dana Otsus di setiap daerah; (5) Papua Sehat-Cerdas-Produktif sebagai prioritas RAPP; (6) Pengawasan Dana Otsus & DTI 2026; (7) Provinsi Olahraga melalui Perpres/Inpres; (8) Asosiasi Kepala Daerah berbadan hukum dengan sekretariat; (9) Sinergitas BP3OKP-MRP-DPRP-Komite Eksekutif; (10) Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB); (11–12) Koordinasi lintas provinsi RAPP 2025–2029.

 **BP3OKP:** BP3OKP berperan sebagai motor penggerak dan penjamin substansi 12 Kesepakatan Timika. Poin 9 secara eksplisit menempatkan BP3OKP sebagai pilar sinergitas kelembagaan bersama MRP, DPRP, dan Komite Eksekutif. BP3OKP mendorong berkontribusi didalam Tim Taskforce yang akan dibentuk untuk Tata Kelola Dana Otsus di setiap daerah (Poin 4) — sebuah legacy kelembagaan yang akan berdampak jangka panjang pada akuntabilitas Otsus se-Tanah Papua.

 **Capaian:** 12 Kesepakatan Timika ditandatangani 6 Gubernur/Wagub se-Papua; Tim Taskforce Tata Kelola Dana Otsus per daerah disepakati; Papua Sehat-Cerdas-Produktif dikukuhkan sebagai prioritas RAPP 2025–2029.

Makna Strategis — Mei 2026 adalah bulan puncak: seluruh 7 kabupaten Papua Barat tuntas Musrenbang Otsus, Musrenbang Provinsi terselenggara, dan 12 Kesepakatan Timika lahir sebagai komitmen lintas provinsi dalam satu kerangka RAPP 2025–2029. BP3OKP menjadi perekat koordinasi dari kabupaten hingga Tanah Papua.

1 ASPEK PERENCANAAN

FORUM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA
12 MEI 2026, TIMIKA



2 ASPEK PENGANGGARAN

Penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola Dana Otonomi Khusus bersama pemangku kepentingan legislatif dan pengawas.

A.1 Forum Penguatan Kapasitas Tata Kelola Dana Otsus — DPRD, MRP & DPRK Papua Barat

📅 6 Mei 2026 📍 Aula Kasuari, GKN Lantai III, Manokwari

Forum yang diselenggarakan BP3OKP RI perwakilan Papua Barat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan tema **Penguatan Peran Kelembagaan Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Otonomi Khusus Papua Barat** dan persiapan Musrenbang RKP 2027. narasumber: KPK, Kemenkeu (DJP), Kemendagri, Bappenas, Bappeda Provinsi. Kemendagri paparkan 29 kewenangan khusus Papua + afirmatif OAP (pendidikan, kesehatan, sosial). Bappenas paparkan 19 program percepatan RAPP. KPK sampaikan 8 rekomendasi MBG dan identifikasi 3 risiko korupsi utama. Diskusi: kegagalan MBG Manokwari Selatan (4 Des), penurunan dana Otsus ke desa Rp250 juta (2013–2018) → Rp30 juta (2023 setelah pajak), keterlambatan gaji.



🎯 **BP3OKP:** BP3OKP memfasilitasi pertemuan Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Otonomi Khusus Papua Barat juga membahas transformasi digital tata kelola Otsus: SIKD-SIPD-SIPP terintegrasi menjadi SATU platform interoperabilitas, berlaku mulai 11 Mei 2026. BP3OKP menegaskan kepada DPRD/MRP: fokus pengawasan di tahap ke-5 (KUA PPAS) — bukan menuntut akses RAP di tahap awal. BP3OKP membangun pendekatan terpadu BP3OKP–MRP–DPRD–DPRK untuk percepatan pembangunan Papua Barat pasca Musrenbang kabupaten.

✅ **Capaian:** 7 kabupaten tuntas Musrenbang Otsus; SIKD-SIPD-SIPP terintegrasi (mulai 11 Mei 2026); 8 rekomendasi KPK tersampaikan; DPRD/MRP paham tahap ke-5 pengawasan; 29 kewenangan khusus Papua disosialisasikan.

3 ASPEK PELAKSANAAN

Keterlibatan langsung BPP mendampingi program prioritas nasional dan kebijakan Otsus di lapangan.

L.1 Kunjungan & Pertemuan Petani Kakao Kab. Manokwari Selatan

📅 1 Mei 2026 📍 Manokwari Selatan

Pokja Papua Produktif turun langsung menemui petani kakao. Ditemukan: kapasitas budidaya memadai (turun-temurun) namun terkendala struktural. 5 kendala utama: (1) belum ada Asosiasi Petani; (2) minimnya intervensi Pemda; (3) keterbatasan alat mesin pertanian; (4) sulitnya akses modal; (5) kurangnya penyuluhan teknis rutin.



📌 **BP3OKP:** Pokja Papua Produktif BP3OKP menyusun 5 Rekomendasi Strategis resmi: (1) Fasilitasi pembentukan Asosiasi Petani Kakao berbadan hukum; (2) Advokasi anggaran APBD/Otsus untuk kakao; (3) Pengadaan alsintan pasca-panen; (4) mendukung akses KUR dan pembiayaan; (5) Penyuluhan teknis rutin. Ini adalah laporan resmi tertulis BP3OKP — bukan sekadar kunjungan.

✅ **Capaian:** Laporan dan Rekomendasi Resmi Pokja Papua Produktif BP3OKP tersusun; 5 kendala struktural petani kakao teridentifikasi secara tertulis sebagai dasar advokasi ke Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.

L.2 Peresmian SMA Konservasi Muhammadiyah (Smamko) & Raker Kemendikdasmen

📅 28 Mei 2026 📍 SMP Advent, Manokwari

Kemendikdasmen RI meresmikan Smamko Manokwari sekaligus membuka Raker II PW Muhammadiyah Papua Barat. Papua Barat ditetapkan prioritas pemerataan kualitas pendidikan Indonesia Timur. Kemendikdasmen berkomitmen perbaiki semua sekolah dan bangun unit baru. Smamko: model sekolah ramah lingkungan — hidup bersih, hemat energi, kurangi plastik.



📌 **BP3OKP:** BP3OKP mengawal agar komitmen Kemendikdasmen tidak berhenti di peresmian simbolik. BP3OKP mendorong Papua Barat mendapat alokasi unit sekolah baru dan perbaikan sekolah rusak secara sistematis. Smamko dikembangkan sebagai model legacy pendidikan berbasis konservasi.

✅ **Capaian:** Papua Barat ditetapkan prioritas pemerataan pendidikan Indonesia Timur; Smamko resmi sebagai model sekolah konservasi; komitmen Kemendikdasmen perbaiki & bangun sekolah baru di Papua Barat.

4 ASPEK PENATAUSAHAAN (TATA KELOLA)

Penguatan sinkronisasi internal, akuntabilitas, dan tindak lanjut forum lintas provinsi.

T.1 Rapat Evaluasi Internal — Tindak Lanjut Forum Koordinasi Strategis Timika

📅 18 Mei 2026 📍 Sekretariat BP3OKP Lt. III GKN, Manokwari

Rapat evaluasi atas Forum Koordinasi Timika (11–12 Mei). Poin yang dibahas:

- (a) Asosiasi Gubernur Se Papua raya sepakati 11 poin;
- (b) Komite Eksekutif dipersepsikan publik lebih besar dari BP3OKP;
- (c) Kepala daerah dan OPD belum sepenuhnya memahami interoperabilitas.



Catatan Legacy Kelembagaan

BP3OKP berkomitmen meningkatkan literasi interoperabilitas bagi seluruh kepala daerah dan OPD Papua Barat sebagai prasyarat tata kelola Otsus yang efektif.



Kelompok Kerja (Pokja)

Papua Sehat

Kelompok Kerja Papua Sehat — BP3OKP Papua Barat

Sasaran Misi: "Tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk Papua Barat"

Berdasarkan Desk Musrenbang Papua Sehat (8 Mei) dan Forum Kapasitas Tata Kelola Otsus (6 Mei 2026).

1 Kendala Pembangunan

- **Papua Barat dalam kondisi 'Darurat Kesehatan' — butuh upaya Extra Ordinary**
- Stunting 15–30%, jauh di atas target 14%; kematian ibu & bayi masih tinggi
- Penyakit ATM-K (AIDS, TBC, Malaria, Kusta) mendominasi beban penyakit
- SDM kesehatan baru 40–60%; banyak puskesmas tanpa tenaga & air bersih
- UHH (Usia Harapan Hidup) Papua Barat masih tertinggal dari nasional
- Akses daerah pedalaman & kepulauan sangat terbatas — butuh floating hospital & flying doctor
- PTM (hipertensi, diabetes, stroke, kanker) meningkat; skrining belum kuat

2 Permasalahan Daerah / Sumbatan

- RKA disusun per bidang — tidak terintegrasi; program provinsi tidak sinkron dengan kabupaten
- Puskesmas bukan basis data — perencanaan tidak bottom-up dari kampung
- Terlalu administratif, banyak perjalanan dinas, sedikit dampak indikator outcome
- Tidak ada dashboard indikator Papua Sehat — tidak ada monitoring real-time
- UHC belum tercapai; MoU BPJS belum disepakati; data kepesertaan OAP tidak sinkron
- Dana Otsus bidang kesehatan tersendat; koordinasi Dinkes Prov–Kab–RSUD–Puskesmas lemah
- Insentif tenaga kesehatan di 3T rendah; retensi SDM kesehatan sulit

Berdasarkan Desk Musrenbang Otsus Provinsi, Forum Timika, dan Forum Kapasitas Tata Kelola Mei 2026.

3 Capaian / Kegiatan yang Sudah Dilakukan

- Desk Musrenbang Papua Sehat (8 Mei): Pokja mempresentasikan 'Satu Sistem Kesehatan Papua Barat' di forum Musrenbang Otsus Provinsi — diterima sebagai konsep resmi
- One Papua Barat Health Planning: seluruh program kesehatan harus menjawab 5 pertanyaan kunci (indikator, lokasi, PJ, output, dampak)
- 4 Program Wajib Papua Barat Sehat ditetapkan: Eliminasi ATM-K, Pengendalian PTM, Kesehatan Ibu & Anak, Akses Daerah Sulit
- 12 Kesepakatan Timika Poin 5: Papua Sehat dikukuhkan sebagai implementasi prioritas RIPPP dan RAPPP 2025–2029
- Perencanaan 4 strategi mobile health: Mobile Clinic, Flying Doctor, Floating Hospital, Puskesmas Keliling, Telemedicine Satelit, Motor Kesehatan Kader Kampung
- Skema pembiayaan kolaboratif dirancang: Provinsi biayai SDM spesialis + logistik ATM-K; Kabupaten biayai operasional Puskesmas + kader; Puskesmas berbasis masalah wilayah
- Forum Kapasitas (6 Mei): alokasi Dana Otsus kesehatan diadvokasikan agar transparan dan tepat sasaran

4 Peran BPP dalam Membuka Sumbatan

- Menginisiasi 'Satu Sistem Kesehatan Papua Barat' sebagai kerangka terpadu lintas Dinkes Prov–Kab–RSUD–Puskesmas–Lintas Sektor–BP3OKP–Mitra Pusat
- Mendorong perubahan paradigma: dari program administratif menuju program berbasis indikator outcome yang terukur per kampung
- Menegaskan Puskesmas sebagai Pusat Komando Kesehatan Kampung — basis perencanaan bottom-up dari kampung ke provinsi
- Memfasilitasi 4 strategi akses daerah sulit: Floating Hospital, Flying Doctor, Telemedicine Satelit, Motor Kesehatan berbasis kader kampung
- Mengadvokasi reformasi RKA kesehatan: setiap kegiatan harus membuktikan kontribusinya pada indikator UHH, stunting, ATM-K, kematian ibu
- Mendorong percepatan UHC: sinkronisasi data BPJS–Dukcapil dan penyelesaian MoU BPJS untuk OAP Papua Barat
- Mengawal skema pembiayaan kolaboratif Provinsi-Kabupaten-Puskesmas agar Dana Otsus tidak menguap di level perencanaan
- **ORANG ASLI PAPUA yang terdaftar dalam Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak boleh mengalami permasalahan deaktivasi kepesertaan. POKJA Papua Sehat menekankan bahwa dalam kerangka pelaksanaan otonomi khusus Papua, orang asli Papua harus memiliki akses yang jelas dan tanpa hambatan terhadap layanan kesehatan.**
- **Peningkatan kepesertaan dan peningkatan mutu pelayanan harus dilaksanakan secara bersamaan dan seimbang. Kualitas pelayanan perlu mendapat perhatian yang setara, baik dari sisi penerima layanan maupun penyedia layanan.**

Pokja REKOMENDASI — PAPUA SEHAT

Rekomendasi prioritas pembangunan berdasarkan hasil kegiatan dan evaluasi lapangan Mei 2026.

1 Implementasikan 'Satu Sistem Kesehatan Papua Barat': semua program wajib menjawab indikator, lokus, output, dan dampak — tidak ada program tanpa target terukur

3 Wajibkan 4 Program Kesehatan Prioritas dalam RKPD seluruh kabupaten: Eliminasi ATM-K, PTM, KIA, dan Akses Daerah Sulit

5 Percepat UHC Papua Barat: sinkronisasi Dukcapil, pendataan kepesertaan OAP per kampung/distrik

7 Tingkatkan insentif SDM kesehatan di 3T; percepat penugasan 392 tenaga medis OAP; kembangkan kader kesehatan kampung

2 Bangun dashboard indikator Papua Sehat berbasis data real-time dari Puskesmas; jadikan Puskesmas Pusat Komando Kesehatan Kampung

4 Implementasikan 4 mobile health: Floating Hospital, Flying Doctor, Telemedicine Satelit, Puskesmas Keliling — anggarkan dari Dana Otsus Provinsi

6 Reformasi RKA kesehatan: hentikan kegiatan administratif tanpa dampak; setiap rupiah harus terhubung dengan indikator outcome Papua Sehat

8 **Peningkatan kepesertaan dan peningkatan mutu pelayanan harus dilaksanakan secara bersamaan dan seimbang. Kualitas pelayanan perlu mendapat perhatian yang setara, baik dari sisi penerima layanan maupun penyedia layanan.**



LAPORAN ANGGOTA POKJA PAPUA PRODUKTIF

PERIODE MEI 2026



Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat



Kegiatan-Kegiatan Strategis





PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas Berkat dan PerkenanNya sehingga laporan kerja bulanan Pokja Papua Produktif pada BP3OKP-RI Kantor Perwakilan Provinsi Papua Barat dapat disusun dan selesai tepat pada waktunya.

Laporan bulanan laporan kerja Pokja Papua Produktif Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pencapaian sasaran sinergi selama Bulan Mei 2026

Laporan ini mendiskripsikan tentang tugas dan fungsi Pokja Papua Produktif yang terakomodir dalam perencanaan strategis, visi-misi, tujuan dan sasaran kegiatan, kebijakan, program, termasuk permasalahan yang dihadapi dan upaya tindaklanjut pemecahan masalah.

Kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka sangat diharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik konstruktif untuk perbaikan laporan lebih lanjut.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua teristimewa kami di jajaran Pokja dan Sekretariat BP3OKP serta setiap pembaca yang mulia.

Manokwari, Mei 2026

Hormat Kami
Pokja Papua Produktif



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tugas dan fungsi Pokok BP3OKP adalah melakukan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dengan Kementerian/Lembaga secara vertikal dari pusat sampai daerah termasuk distrik dan kampung. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat berdasarkan Sistem Perencanaan Nasional dan Daerah berperan sebagai **Media Utama** untuk mengarahkan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar sinergi dan serasi dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004*. Dalam pelaksanaan tugas BP3OKP untuk mengawal Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus di bidang Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif sesuai amanat Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang diatur dalam Perpres No 24 Tahun 2023, maka tugas Pokja Papua Produktif selalu mendampingi dan berkoordinasi dengan Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua dan Polhukam terutama mengenai bidang tugas dari ketiga pokja tersebut yang akan bersentuhan dengan masalah kesejahteraan dalam hal ini terutama dari ketiga pokja dimaksud berkaitan dengan Pembentukan Kawasan Tentang Kiprah Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Polhukam.

Selama perjalanan pemerintahan dan pembangunan pada Bulan Mei Tahun 2026, Pokja Papua Produktif hanya menitikberatkan pada kesejahteraan guna meningkatkan dan perbaikan kebutuhan serta ekonomi masyarakat Papua Barat khususnya Orang Asli Papua (OAP), yaitu mendampingi serta merealisasikan dan mensosialisasikan amanat kebijakan Undang-Undang No 21 Tahun 2021 Pasal 47 tentang Pengawasan Sosial oleh masyarakat terhadap Pelaksanaan Otonomi Khusus, dan Peraturan Pemerintah No 107 Tahun 2021 Pasal 47 yang mengamanatkan Peran serta Masyarakat dalam Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus. Disisi lain Pokja Papua Produktif juga terlibat di dalam setiap Forum Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh pokja lainnya dan menjelaskan kepada pemerintah daerah melalui pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat tentang pentingnya sinergitas dan kerja sama Kementerian/Lembaga Non Kementerian seperti BPKP, BPK, KPK, Kejaksaan, Pemerintah Daerah/APIP, Ombudsman, DPRP/DPRK, Perguruan Tinggi Negeri dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang dikoordinir oleh BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat.

Output daripada kinerja Pokja Papua Poroduktif Bersama pokja lainnya telah memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat tentang tata cara penerimaan dan penggunaan dana Otsus. Disisi lain output yang dihasilkan Pokja Papua Produktif terkait dengan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Manokwari memberikan pemahaman kepada pimpinan OPD dalam perencanaan program dibidang pemberdayaan masyarakat.

Demikian diskripsi ringkasan eksekutif (eksecitive summary) Pokja Papua Produktif yang disampaikan untuk diketahui dan di mohon petunjuk lebih lanjut



Pendahuluan

Perpres No 121 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) terdiri dari 4 (empat) Pokja, yaitu Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif dan Papua Pohukam (Papua Damai). Keempat Pokja tersebut melaksanakan tugas dan fungsi pokok BP3OKP, yaitu Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Otonomi Khusus yang bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan antar daerah dan kesenjangan sektor demi terwujudnya Orang Asli Papua (OAP) yang sejahtera dan mandiri. Untuk mencapai tujuan Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud, maka BP3OKP melalui kerja-kerja Pokja telah membangun koordinasi dan sinergitas dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan setiap kabupaten di wilayah kerja Provinsi Papua Barat untuk bersama-sama mendorong proses percepatan pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Khusus sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2021 Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Berdasarkan peraturan perundang undangan dimaksud maka BP3OKP telah melaksanakan fungsinya dan secara operasional dilakukan oleh setiap kelompok kerja (Pokja) dan melalui kesempatan ini Pokja Papua Polhukam akan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas Bulan Agustus untuk dijadikan data dan informasi kinerja pelaksanaan Poka Papua Politik, Hukum dan Keamanan untuk penmgambilan kebijakan lebih lanjut.



Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi BP3OKP didasarkan pada Perpres No. 121 Tahun 2022. Khusus untuk tugas pokok dan fungsi Pokja Papua Produktif, dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Tugas

- Mendorong semangat Otonomi Khusus melalui pelaksanaan demokrasi yang berkeadilan, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap orang dalam pelaksanaan Otonomi Khusus;
- Bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan **Desentralisasi Asimetris** untuk mewujudkan kekhasan daerah, karakteristik daerah dan kekhususan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;
- Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga terkait di Kesejahteraan masyarakat;
- Melaksanakan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan pendampingan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) demi mensejahterakan masyarakat dan pemerataan ekonomi;
- Melakukan pemantauan dan asesmen terhadap kinerja pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan Otonomi Khusus;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kawasan yang disiapkan oleh daerah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus terkait dengan Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Polhukam;
- Mendukung dan mendorong program kerja Pemerintah daerah di bidang peningkatan ekonomi masyarakat.

2. Fungsi

- Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terhadap kebijakan program pelaksanaan Otonomi Khusus;
- Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta kelembagaan yang berada dalam masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penggunaan dana Otsus bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola dana tersebut;
- Menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas Pokja Papua Produktif kepada Pimpinan BP3OKP untuk diteruskan pada Presiden melalui Wakil Presiden.



Kegiatan-Kegiatan Strategis



Dalam Rangka Penguatan Sektor Pertanian Berbasis Komoditas Unggulan di wilayah Papua Barat, pada Hari/Tanggal : Jumat, 01 Mei 2026 Anggota Pokja Papua Produktif BP3OKP RI Perwakilan Papua Barat telah melaksanakan pertemuan langsung bersama para Petani Kakao di Kabupaten Manokwari Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pendampingan, identifikasi kebutuhan, serta penggalian potensi lokal guna mendukung program pemberdayaan masyarakat petani secara berkelanjutan. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan petani Kakao dari beberapa kampung di Wilayah Manokwari Selatan. Hasil diskusi menunjukkan bahwa masyarakat petani kakao di wilayah ini memiliki kapasitas budidaya yang cukup memadai, namun masih menghadapi berbagai kendala struktural yang menghambat peningkatan produktivitas dan kesejahteraan mereka. ***Dalam pertemuan tersebut Anggota Pokja Papua Produktif Drs. Lalu Suprpta, MM. menekankan bahwa selalu berkomitmen untuk terus hadir mendampingi masyarakat petani Kakao di Kabupaten Manokwari Selatan khususnya di Distrik Ransiki. Selain itu POKJA merekomendasikan agar segera difasilitasi pembentukan Asosiasi Petani Kakao Manokwari Selatan yang berbadan hukum, sebagai wadah kolektif dalam mengakses program pemerintah, lembaga keuangan, dan pasar. Asosiasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan mendorong tata kelola usaha Kakao yang lebih terorganisir. Potensi besar yang dimiliki oleh para petani perlu mendapat dukungan nyata dari seluruh pemangku kepentingan terutama Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun pemerintah Kabupaten agar komoditas Kakao Papua Barat dapat berkembang menjadi salah satu unggulan nasional yang berdaya saing tinggi. BP3OKP Provinsi Papua Barat melalui Anggota POKJA Papua Produktif merekomendasikan agar petani kakao difasilitasi untuk mengakses skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian, Dana Bergulir LPDB-KUMKM, maupun pembiayaan syariah melalui perbankan lokal. Pendampingan administratif diperlukan agar petani mampu memenuhi persyaratan pengajuan kredit secara mandiri. Anggota Pokja Papua Produktif akan mengadvokasi kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dan Pemerintah Provinsi Papua Barat agar mengalokasikan anggaran dan program khusus bagi pengembangan pertanian kakao, termasuk dukungan dalam APBD, program ketahanan pangan, serta kemitraan dengan Dinas Pertanian dan instansi terkait.***





Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang Otsus dan RKPd) Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2027 berlangsung pada **Hari/Tanggal : Senin, 04 Mei 2026 di Aula salah satu Gedung gereja di Distrik Ransiki**. Kegiatan Musrenbang Otsus dan Musrenbang RKPd Tahun 2027 diikuti oleh seluruh Forkopimda di Kabupaten Manokwari Selatan. Acara tersebut diawali dengan serangkaian pembukaan kegiatan dan secara resmi dibuka oleh Bupati Kabupaten Manokwari Selatan. Setelah pembukaan Musrenbang dilanjutkan dengan arahan/materi dari berbagai Narasumber yang dihadirkan. **Dalam sambutannya Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Bernard Mandacvan, S.IP menyampaikan bahwa pentingnya strategis Musreimbang dalam menentukan arah pembangunan daerah. Tema pertemuan tersebut adalah "Percepatan Layanan Dasar Berkualitas dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Pemberdayaan Masyarakat serta Penguatan Ekonomi Lokal di dalam Koridor Otonomi Khusus. Lebih lanjut ia menguraikan lima bidang prioritas dalam pembangunan Provinsi Papua Barat tahun 2027, yaitu: meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar yang adil dan inklusif; mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperkuat perlindungan sosial; memberdayakan ekonomi lokal dan pengolahan hasil berbasis sektor unggulan daerah; meningkatkan kesempatan kerja serta memperkuat UMKM dan kewirausahaan lokal; serta mengurangi kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur dan konektivitas dasar. Selain itu ia juga menyampaikan bahwa dana Otsus adalah milik masyarakat, bukan milik aparat pemerintah, dan mengajak para pimpinan aparat daerah untuk berkomitmen serius mengusulkan program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Manokwari Selatan. Ia menekankan tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang terpencil, kurang berpendidikan, dan miskin, dengan memandang pejabat pemerintah sebagai pelayan masyarakat, bukan pemilik dana. Turut hadir Kepala BP3OKP-RI Provinsi Papua Barat, Irene Manibuy, SH.,M.Kn dalam pemaparan materinya beliau menyampaikan bahwa Tata Kelola penggunaan Dana Otonomi Khusus saat ini tidak seperti sebelumnya. Ia juga menyampaikan bahwa Dana otsus bukan sekedar anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat kepada BP3OKP melainkan kepada masyarakat di Papua khususnya Orang Asli Papua (OAP). Dana Otsus merupakan salah satu instrument keberpihakan negara kepada Orang Asli Papua (OAP). Ukuran keberhasilan Dana Otsus tidak dilihat berdasarkan seberapa besar anggaran yang diberikan dan terserap melainkan apakah penyaluran Dana Otsus berdampak positif dan tepat sasaran?, Dampak nyata penggunaan Dana Otsus harus diutamakan daripada serapan anggaran. Serta Kondisi fiskal Nasional saat ini sangat memprihatinkan. Daerah sangat bergantung kepada Transfer Pusat dan dana Otsus. PAD Manokwari Selatan sangatlah memprihatinkan. Pengeolahan produk komoditas unggulan di Manokwari Selatan seperti Coklat harus difkuskan. 4 (empat) arah utamamenjadi titik fokus dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yaitu Prioritas Orang Asli Papua (OAP) seperti bidang Pendidikan, Kesehatan, pemberdayaan ekonomi Orang asli Papua dan infrastruktur. Sedikit program namun dampaknya besar jika dibandingkan dengan banyak program namun sedikit manfaatnya untuk masyarakat. Dana Otsus harus berbasis data bukan perkiraan (berandai-andai) serta kebutuhan yang nyata yang dibutuhkan oleh masyarakat (bukan program siluman). Program juga harus menggunakan data Kemsikinan khususnya di kabupaten Manokwari Selatan terutama data prioritas yang berada di tingkat kampung/kelurahan.**

Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manokwari diawali dengan pembukaan sambutan Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Manokwari R. Alfons selanjutnya sambutan Bupati kabupaten Manokwari yang diwakili oleh Wakil Bupati Kabupaten Manokwari, Bapak Mugiono, S.Hut.,M.Ling. kegiatan dilanjutkan dengan Pengarahan oleh Plt. Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Ir. Charlie Heatubun, Kepala BP3OKP-RI Papua Barat, Ibu Irene Manibuy, SH.,M.Kn, Hermus Indou, Ketua DPRK Manokwari. Kegiatan pengarahan dibantu oleh Moderator atas nama Victor Rumere. Dalam sambutan mewakili **Bupati Kabupaten Manokwari Mugiono, S.Hut.,M.Ling** menyampaikan bahwa **jika salah merencanakan maka kita sedang merencanakan kegagalan. Perencanaan pembangunan daerah seharusnya benar-benar menggambarkan kebutuhan masyarakat serta potensi wilayah yang dimiliki. Proses perencanaan yang baik dimulai sejak perencanaan di tingkat musrenbang kampung, musrenbang distrik hingga musrenbang provinsi bahkan musrenbang nasional. Program yang dihasilkan diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut ia menambahkan akhir-akhir ini kondisi keuangan sangat memprihatinkan sehingga berdampak terhadap dana Transfer Daerah sehingga menyebabkan turunnya Pendapatan daerah. Sementara disisi lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu mendongkrak kemampuan fiskal daerah. Prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 adalah penguatan infrastruktur dan konektivitas daerah dengan fokus utama pembangunan infrastruktur strategis perkotaan untuk mendukung Manokwari sebagai Ibukota Provinsi Papua Barat maupun kota peradaban di Tanah Papua. Sementara itu, materi juga disampaikan oleh Kepala BP3OKP-RI Provinsi Papua Barat, Irene Manibuy, SH.,M.Kn. dalam arahnya ia menyampaikan bahwa BP3OKP sangat mendukung program-program perencanaan pembangunan Kabupaten Manokwari. Sebab dinilai sebagai kunci untuk merubah wajah Kota Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat. Selain itu, Program-program yang sudah diusulkan akan segera ditindaklanjuti. Terutama diharapkan kolaborasi antara BP3OKP dengan Komite Eksekutif guna secepatnya program direalisasikan. Dana Otonomi Khusus bukan hanya sekedar dana atau anggaran yang diberikan kekhususan kepada Orang Asli Papua (OAP). Dana Otsus adalah Instrument keberpihakan Negara kepada Orang Asli Papua (OAP). Sehingga ukuran keberhasilan kita bukan hanya beberapa anggaran yang diserapt pada setiap tahun, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu diharapkan dapat bergeser dari serapan anggaran ke dampak yang dirasakan oleh masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP). Kondisi fiskal saat ini menuntut harus lebih berpijak, dimana ruang fiskal nasional semakin terbatas dan selektif. Sehingga Dihimbau kepada para OPD mengingat keuangan kita saat ini lagi dilakukan efisiensi maka diharapkan Pendapatan asli Daerah (PAD) harus lebih ditingkatkan. Setiap rupiah harus betul-betul optimal. Tantangan yang sering dihadapi adalah kepada para pimpinan OPD bahwa program yang direncanakan terlalu banyak, namun dampaknya sangat kecil bagi masyarakat. Penumpukan kegiatan diakhir tahun, belanja belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan real di masyarakat. Pengusulan program-program kedepan, BP3OKP sangat berharap DPR dalam menyampaikan pokok-pokok pikiran (aspirasi) harus mewakili semua unsur termasuk masyarakat, adat dan masyarakat ekonomi bawah. Pokir anggota DPR tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, masyarakat juga harus dilibatkan terutama oleh pemerintah Kabupaten Manokwari.**



Rabu, 06 Mei 2026 bertempat di Aula Kasuari lantai III, Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari dilaksanakan **Focus Group Discussion (FGD)** dengan **Tema : Penguatan Peran Kelembagaan dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Otonomi Khusus Papua Barat**. Kegiatan tersebut menghadirkan beberapa Narasumber dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Adapun peserta yang turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain : Kepala BP3OKP Papua Barat, Irene Manibuy, SH.,M.Kn, Ayub Msiren (Anggota Pokja Papua Cerdas), Drs. Lalu Suprpta, MM (Anggota Pokja Papua Produktif, Staf, ST (Anggota Pokja Papua Produktif dan Dr. Ismail Sirfeffa, S.Sos.,MH (Anggota Pokja Papua Polhukam), Prof. Charlie Heatubun, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, Bappeda Provinsi Papua Barat, Anggota DPR Papua Barat Fraksi Otsus, Anggota DPRK Manokwari, MRP Papua Barat. **Kepala BP3OKP-RI Provinsi Papua Barat, Irene Manibuy, SH.,M.Kn** dalam arahannya ia menyampaikan bahwa BP3OKP sangat mendukung program-program perencanaan pembangunan Kabupaten Manokwari. Sebab dinilai sebagai kunci untuk merubah wajah Kota Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat. Selain itu, Program-program yang sudah diusulkan akan segera ditindaklanjuti. Terutama diharapkan kolaborasi antara BP3OKP dengan Komite Eksekutif guna secepatnya program direalisasikan. Dana Otonomi Khusus bukan hanya sekedar dana atau anggaran yang diberikan kekhususan kepada Orang Asli Papua (OAP). Dana Otsus adalah Instrument keberpihakan Negara kepada Orang Asli Papua (OAP). Sehingga ukuran keberhasilan kita bukan hanya beberapa anggaran yang diserapt pada setiap tahun, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu diharapkan dapat bergeser dari serapan anggarang ke dampak yang dirasakan oleh masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP). Kondisi fiskal saat ini menuntut harus lebih berpijak, dimana ruang fiskal nasional semakin terbatas dan selektif. Sehingga Dihimbau kepada para OPD mengingat keuangan kita saat ini lagi dilakukan efisiensi maka diharapkan Pendapatan asli Daerah (PAD) harus lebih ditingkatkan. Setiap rupiah harus betul-betul optimal. Tantangan yang sering dihadapi adalah kepada para pimpinan OPD bahwa program yang direncanakan terlalu banyak, namun dampaknya sangat kecil bagi masyarakat. Penumpukan kegiatan diakhir tahun, belanja belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan real di masyarakat. Pengusulan program-program kedepan, BP3OKP sangat berharap DPR dalam menyampaikan pokok-pokok pikiran (aspirasi) harus mewakili semua unsur termasuk masyarakat, adat dan masyarakat ekonomi bawah. Pokir anggota DPR tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, masyarakat juga harus dilibatkan terutama oleh pemerintah Kabupaten Manokwari.

Prof. D. Charli Heatubun dalam pemaparannya beliau mengatakan bahwa **Dengan perkembangan system terbaru serta regulasi berdasarkan perubahan UU Otsus serta beberapa peraturan dari kementerian maka pengelolaan dana Otsus dapat dibuat secara transparan, akuntabel dan efisien, guna mewujudkan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban yang baik.** Kegiatan hari ini memastikan koordinasi baik antara Eksekutif, Legislatif, BP3OKP, MRP guna mewujudkan pemahaman tentang Tata Kelola Penggunaan Dana Otsus agar tepat sasaran. Sejak awal Bappeda Provinsi Papua Barat harus memastikan usulan dan pokok pikiran anggota DPR harus tetap berjalan dengan baik. Selain itu ia menekankan bahwa Saat ini sedang berlangsung Forum Rapat Kerja daerah. Artinya pikir-pikiran yang belum diusulkan akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah guna mendorong program kerja saat pelaksanaan Musrenbang Tingkat Provinsi Papua Barat.



Kamis, 07 Mei 2026 bertempat di Aula Aston Niu Hotel Manokwari, Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si membuka secara resmi Musrenbang Otsus dan Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2027. Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR Papua Barat, MRP Papua Barat, pemerintah kabupaten se-Papua Barat, instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur Dominggus Mandacan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan Musrenbang. Gubernur Papua Barat juga menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi momentum strategis untuk memastikan proses perencanaan pembangunan daerah berjalan secara terarah, terpadu, partisipatif serta menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Gubernur menegaskan Musrenbang merupakan bagian penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam kerangka tersebut, pembangunan daerah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional dengan memanfaatkan potensi lokal, inovasi serta daya saing daerah guna mencapai pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan tema RKP Nasional Tahun 2027 yakni **“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”**, **Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan tema RKPD Tahun 2027 yaitu “Akselerasi dan Pemerataan Akses Pelayanan Dasar Berkualitas serta Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Hilirisasi Ekonomi Lokal dalam Koridor Otonomi Khusus”**. tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan transformasi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dengan menempatkan Orang Asli Papua sebagai subjek utama pembangunan serta mendorong penguatan ekonomi lokal sebagai pengungkit pertumbuhan daerah. Selanjutnya Gubernur menekankan pentingnya semangat Otonomi Khusus terintegrasi dalam seluruh prioritas pembangunan sebagai upaya mewujudkan penghormatan, pemberdayaan, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua. Selai itu menyebut Otonomi Khusus bukan sekadar kewenangan administratif, tetapi merupakan instrumen keadilan sosial yang harus diwujudkan secara nyata dalam kebijakan pembangunan. **Dalam arah kebijakan pembangunan Tahun 2027, Pemerintah Provinsi Papua Barat memfokuskan pembangunan pada tujuh prioritas daerah, yakni peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar yang merata dan inklusif, percepatan penurunan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi lokal berbasis sektor unggulan daerah, peningkatan kesempatan kerja dan penguatan UMKM, pengurangan ketimpangan wilayah melalui penguatan infrastruktur dan konektivitas dasar, pembangunan masyarakat adat yang tangguh terhadap perubahan sosial, budaya, iklim dan pelestarian lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah.** Gubernur juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif. **Indeks Pembangunan Manusia Papua Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 68,48 meningkat dari 67,69 pada tahun sebelumnya, dengan target mencapai 69,94 pada tahun 2027. Tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 21,66 persen pada tahun 2024 menjadi 19,58 persen pada September 2025. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,46 persen. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 4,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,13 persen. Sementara rasio gini tercatat sebesar 0,374 dengan target penurunan menjadi 0,331 pada tahun 2027.** Gubernur juga mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk aktif memberikan masukan, saran dan rekomendasi konstruktif demi penyempurnaan RKPD Tahun 2027. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan Papua Barat yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Pentingnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, berbasis data serta berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, penguatan integrasi perencanaan dan penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah serta peningkatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi hal yang sangat penting guna mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, selain itu, **Plt. Kepala Bappeda Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut., M.Si dalam laporannya menyampaikan Musrenbang Otsus dan RKPD 2027 merupakan tahapan strategis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 lebih lanjut**, terdapat empat poin utama yang menjadi fokus pelaksanaan Musrenbang Otsus dan RKPD Tahun 2027, yakni menyelaraskan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah, mengintegrasikan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2027, menyepakati arah kebijakan pembangunan daerah dalam kerangka Otonomi Khusus, serta menghasilkan kesepakatan bersama sebagai bahan penyempurnaan RKPD Papua Barat Tahun 2027. "Tujuan Musrenbang Otsus dan RKPD 2027 dilaksanakan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan nasional dan mengintegrasikan program serta kegiatan prioritas dalam rangka Otonomi Khusus guna mendorong percepatan pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan di Papua Barat.

Pertemuan Para Gubernur, Majelis Rakyat Papua (MRP), Bupati, dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) se-Tanah Papua baru-baru ini diselenggarakan dalam rangka Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua. **Pertemuan tingkat tinggi dilaksanakan di Timika pada 11 Mei 2026 dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Pusat, Komite Eksekutif, serta 42 kepala daerah kabupaten/kota, dan Anggota BP3OKP Se-Tanah Papua. Fokus utama dari pertemuan tersebut adalah evaluasi, penguatan sinergi, dan penyamaan persepsi terkait implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan Papua yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Forum strategis ini juga untuk memberikan pembekalan, menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama, serta memperkuat peran pimpinan daerah dan lembaga pengawasan dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus.** Berikut adalah poin-poin penting yang disepakati dan dibahas dalam pertemuan tersebut:

Kesepakatan Timika: Forum koordinasi menghasilkan 12 poin kesepakatan strategis yang berfokus pada sinkronisasi tata kelola pembangunan dan penguatan kelembagaan Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua; **Tata Kelola Dana Otsus:** Pertemuan secara tegas menekankan pentingnya pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat; **Pelaksanaan Sensus OAP:** Forum mendorong percepatan pelaksanaan Sensus Orang Asli Papua (OAP) guna pemutakhiran data sosial dan ekonomi masyarakat dan **Revisi Regulasi:** Terdapat dorongan untuk merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33 Tahun 2024 serta revisi PP Nomor 54 Tahun 2004 terkait Majelis Rakyat Papua (MRP) demi memperkuat pengawasan. Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua dengan tema penguatan implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih Sejahtera. Kegiatan ini dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Staf Khusus Bidang Pemerintahan Desa dan Perbatasan Daerah, maupun lembaga terkait, Gubernur se-Tanah Papua, Para Bupati, unsur pemerintah tingkat provinsi, SKALA dan mitra pembangunan lainnya serta perguruan tinggi. Turut hadir dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, Wakil Gubernur Papua Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Asisten II Setda Papua Barat, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Papua Barat, Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat. Dalam laporan panitia, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Silwanus Sumule menyampaikan bahwa forum ini merupakan inisiatif sebagai bentuk komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal implementasi otsus secara lebih efektif, terarah dan berdampak nyata. Kegiatan ini tidak hanya mengawasi aspek kebijakan tetapi juga memastikan koordinasi lintas pemerintah dan penguatan tata kelola dana otsus sehingga tepat sasaran. Kegiatan hari pertama difokuskan pada pertemuan level pimpinan (Kementerian/Lembaga, para Gubernur, MRP, DPR, BP3OKP, Bupati/Walikota serta para pengambil kebijakan strategis se-tanah Papua. Pembahasannya meliputi Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua pasca UU No. 2 tahun 2021 dalam perspektif legislatif, *Grand Design* Pembangunan Papua menuju Papua yang Sejahtera, Arah Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Otonomi Khusus sebagai Manifestasi Desentralisasi Asimetris dan Kebijakan Tambahan Dana Otsus TA 2026, Peran Strategis BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua dalam Mengawal Percepatan Pembangunan Papua, dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Dana Otsus pasca UU No. 2 tahun 2021 dalam perspektif Daerah. Pada hari kedua, kegiatan difokuskan lebih teknis bersama perangkat daerah pada enam provinsi dan kabupaten kota se-tanah Papua, Mengawal Konsistensi Perencanaan RAPPP dengan RKPD dan Musrenbang Otsus, Kebijakan Umum Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otsus berdasarkan PMK 33 Tahun 2024, Perencanaan Anggaran Daerah dalam konteks Interoperabilitas SIPPP, SKPD, SIKD, Perbaikan dan Penguatan Tata Kelola Dana Otsus melalui Revisi PMK 33 Tahun 2024. “Kami berharap kegiatan ini dapat bermanfaat dan memberi dampak yang baik untuk kemajuan Tanah Papua.



REPUBLIK INDONESIA



KESEPAKATAN TIMIKA DALAM FORUM KOORDINASI STRATEGIS ASOSIASI KEPALA DAERAH PROVINSI SE-TANAH PAPUA

Timika, 11 Mei 2026



Dalam semangat kebersamaan, **FORUM KOORDINASI STRATEGIS ASOSIASI KEPALA DAERAH PROVINSI SE-TANAH PAPUA** menyepakati beberapa hal strategis sebagai berikut: **Pertama**, Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua tetap berkomitmen mendukung agenda dan program strategis Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045; **Kedua**, Mendorong keberlanjutan program dan kegiatan strategis Pemerintah yang dilaksanakan di Tanah Papua sejak tahun 2024, seperti Trans Papua, Tol Udara, BBM 1 Harga dengan dukungan penerbangan khusus, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Kawasan Pariwisata Prioritas Raja Ampat dan Destinasi Pariwisata prioritas di masing-masing Provinsi, Kawasan Industri Teluk Bintuni, Kawasan Industri Pupuk Fafak, Kawasan Industri Perikanan Nabire, Biak, Timika dan Merauke; Kawasan Industri Timika, dan Kawasan Sentra Pertanian Nabire, Merauke dan Papua Pegunungan, maupun berbagai kegiatan prioritas nasional lainnya di Tanah Papua dengan prinsip kekhususan; **Ketiga**, Mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Kawasan Inti Pusat dan infrastruktur penunjang Kantor Pemerintahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang dituntaskan paling lambat tahun 2028 dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Daerah Otonom Baru/Provinsi Baru; **Keempat**, Mendorong terwujudnya pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan dari Kementerian terkait (Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas) dan Mitra Pembangunan Internasional dalam rangka penguatan pengelolaan Dana Otsus sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021, dan PMK 33/2024, salah satunya melalui pembentukan Tim Taskforce Tata Kelola Dana Otsus di setiap daerah guna memperkuat koordinasi Pusat-Daerah. **Kelima**, Mendorong terwujudnya Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif sebagai implementasi Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua melalui program Percepatan Pembangunan di Papua. **Keenam**, Mengawal secara serius penggunaan atas tambahan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2026, sebagaimana arahan Bapak Presiden di Istana Negara, Jakarta. **Ketujuh**, Mendorong terwujudnya Provinsi-provinsi di Tanah Papua sebagai “Provinsi Olah Raga” melalui dasar hukum Perpres/Inpres guna membangun generasi muda sejak usia dini hingga tingkat prestasi. **Kedelapan**, Memperkuat kelembagaan Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua melalui: (a). Legalitas badan hukum; (b). Pembentukan badan kolaborasi lintas Provinsi berupa Sekretariat Asosiasi, dengan kolaborasi pembiayaan yang proporsional dari setiap pemerintah provinsi, yang memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan Kebijakan Otonomi Khusus Papua di 6 (enam) provinsi; (c). Serta menunjuk Sekretaris Daerah masing-masing Provinsi sebagai pejabat penghubung Sekretariat Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua. **Kesembilan**, Membangun sinergitas kelembagaan antara Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, BP3OKP dan Komite Eksekutif dalam mendukung percepatan Pembangunan Papua. **Kesepuluh**, Mengoptimalkan pelaksanaan Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB) menuju prioritas Papua Sehat, Cerdas dan Produktif, dengan fokus pada: Penyelesaian pendataan sosial ekonomi terpilah OAP dan non OAP, Sekolah sepanjang hari, Beasiswa Pendidikan bagi OAP, Jaminan Kesehatan OAP; dan Perlindungan sosial bagi OAP yang rentan. **Kesebelas**, Melaksanakan pertemuan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pertemuan Para Gubernur, Majelis Rakyat Papua (MRP), Bupati, dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) se-Tanah Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua diselenggarakan dalam rangka Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua. Pertemuan tingkat tinggi dilaksanakan di Timika pada Tanggal 11-12 Mei 2026 dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Pusat, Komite Eksekutif, serta 42 kepala daerah kabupaten/kota, dan Anggota BP3OKP Se-Tanah Papua. Fokus utama dari pertemuan tersebut adalah evaluasi, penguatan sinergi, dan penyamaan persepsi terkait implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Anggota BP3OKP Provinsi Papua Barat melaksanakan pertemuan terbatas dengan Anggota Pokja guna mengevaluasi kegiatan yang dimaksud. ***Dalam pertemuan terbatas tersebut, Pimpinan BP3OKP-RI Provinsi Papua Barat, Irene Manibuy menyampaikan bahwa ada peserta forum yang berpendapat agar syarat salur sebagai persyaratan penyaluran Dana Otonomi khusus perlu dihilangkan. Hal tersebut sangatlah menuai kontroversi termasuk dari BP3OKP Papua Barat. Irene Manibuy, SH.,M.Kn menilai bahwa hal tersebut sangatlah tidak relevan. Alasan Syarat salur adalah agar para kepala daerah baik gubernur maupun para bupati termasuk para pimpinan OPD dalam menggunakan dana Otsus agar tepat sasaran dan penggunaannya bisa diketahui berdasarkan lokasi titik koordinat sehingga bisa diketahui. Oleh karena itu, menanggapi hla demikian maka perlu ada pertemuan dengan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PPN/Bappenas guna membahas lebih lanjut Tata Kelola Penggunaan Dana Otsus serta pengawasannya terhadap Lembaga BP3OKP. Selain itu pertemuan juga membahas masalah surat yang dibuat oleh Oknum tertentu yang mengatasnamakan Anggota BP3OKP Papua Barat untuk merekomendasikan salah seorang untuk menduduki Jabatan sebagai Sekretaris Eksekutif BP3OKP/BPP dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam hal ini Anggota BP3OKP Provinsi Papua Barat tidak bertanggung jawab atas surat tersebut, karena merasa tidak pernah menandatangani maupun terlibat dalam kegiatan kelompok tertentu. Artinya surat tersebut adalah pemalsuan. Selain itu 11 point yang menjadi kesepakatan para Gubernur tersebut sudah disepakatai sebelumnya tanpa ada diskusi di forum Asosiasi tersebut. Dalam rangka mendukung strategi implementasi Interoperabilitas akan dibentuk Tim Task Force Pusat-Daerah. Tim tersebut akan didukung oleh perwakilan anggota Pokja BP3OKP dan Tenaga Ahli Skaladi masing-masing provinsi.***





Capaian Dan Rekomendasi





CAPAIAN

Pada Bulan Mei Tahun 2026, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Pokja Papua Produktif mencatat sejumlah capaian kinerja strategis melalui pelaksanaan fungsi SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi), khususnya dalam penguatan perencanaan daerah, koordinasi strategis sesuai misi percepatan pembangunan, serta pengawasan dan harmonisasi lintas sektor dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Beberapa capaian BP3OKP-RI Provinsi Papua Barat Pokja Papua Produktif pada Bulan Mei 2026 dari 10 kegiatan adalah antara lain sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan pertemuan antara Para Petani Kakao yang berada di Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pendampingan, identifikasi kebutuhan, serta penggalian potensi lokal guna mendukung program pemberdayaan masyarakat petani secara berkelanjutan. Hasil diskusi menunjukkan bahwa masyarakat petani kakao di wilayah ini memiliki kapasitas budidaya yang cukup memadai, namun masih menghadapi berbagai kendala struktural yang menghambat peningkatan produktivitas dan kesejahteraan mereka.
2. Berdasarkan kegiatan Musrenbang Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pegunungan Manokwari Selatan Tahun 2027, adalah pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan telah menyusun Rencana Program Kerja Tahunan Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2027 sesuai dengan Dokument Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). Serta para pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak sudah memahami Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP). Selain itu focus Musrenbang Otsus dan RKPD Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2027 adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yaitu focus pada sector Pertanian, perkebunan dan lain-lain.
3. Bidang Infrastruktur adalah titik fokus utama Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Muserenbang Otsus dan RKPD) Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2027. Mengingat sudah ada berbagai program yang telah direncanakan pada bidang infrastruktur seperti Jembatan Pepera Prabowo Subianto.
4. Berdasarkan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema : Penguatan Peran Kelembagaan dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Otonomi Khusus Papua Barat, peserta dapat memahami arah kebijakan dan penggunaan Dana Otonomi Khusus bagi Orang Asli Papua (OAP).
5. Berdasarkan pelaksanaan Musrenbang Otsus dan RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2027 dapat dicapai Indeks Pembangunan Manusia Papua Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 68,48 meningkat dari 67,69 pada tahun sebelumnya, dengan target mencapai 69,94 pada tahun 2027. Tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 21,66 persen pada tahun 2024 menjadi 19,58 persen pada September 2025. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,46 persen. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 4,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,13 persen. Sementara rasio gini tercatat sebesar 0,374 dengan target penurunan menjadi 0,331 pada tahun.
6. Dalam semangat kebersamaan, **FORUM KOORDINASI STRATEGIS ASOSIASI KEPALA DAERAH PROVINSI SE-TANAH PAPUA** menyepakati beberapa hal strategis sebagai berikut Capaian berikutnya adalah para Bupati se-Provinsi Papua Barat telah bersepakat mengembalikan Kewenangan Pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Papua Barat yang dinilai selama ini telah memberatkan Pemerintah Kabupaten dalam pelayanan kesejahteraan Pendidikan terutama guru honor maupun PNS.
7. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan dan Anggota Pokja BP3OKP-RI Provinsi Papua Barat, maka para anggota pokja telah memahami secara keseluruhan dari kegiatan Asosiasi pertemuan Kepala Daerah yang dilaksanakan di Timika.



REKOMENDASI UMUM

Rekomendasi umum berdasarkan capaian antara lain, yaitu Dari 7 jenis item laporan yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Anggota Pokja Papua Produktif, Drs.Irjepol (Pur). Lalu Suprpta, MM merekomendasikan agar segera difasilitasi pembentukan Asosiasi Petani Kakao Manokwari Selatan yang berbadan hukum, sebagai wadah kolektif dalam mengakses program pemerintah, lembaga keuangan, dan pasar. Asosiasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan mendorong tata kelola usaha Kakao yang lebih terorganisir.
2. PAD Manokwari Selatan sangatlah memprihatinkan. Maka Pengolahan produk komoditas unggulan di Manokwari Selatan seperti Coklat harus difokuskan. 4 (empat) arah utamamenjadi titik fokus dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yaitu Prioritas Orang Asli Papua (OAP) seperti bidang Pendidikan, Kesehatan, pemberdayaan ekonomi Orang asli Papua dan infrastruktur. Dana Otsus harus berbasis data bukan perkiraan (berandai-andai) serta kebutuhan yang nyata yang dibutuhkan oleh masyarakat (bukan program siluman). Program juga harus menggunakan data Kemsikinan khususnya di kabupaten Manokwari Selatan terutama data prioritas yang berada di tingkat kampung/kelurahan.
3. Mengingat Infrastruktur adalah hasil Musrenbang Otsus dan RKPD Kabupaten Manokwari Tahun 2027 tentu diharapkan sejalan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggerakkan berbagai sector seperti pertanian, Pajak, potensi Pariwisata dan Kebudayaan dan lain sebagainya. Selain itu Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari dan para pimpinan OPD yang mengikuti Forum Diskusi Musrenbang tersebut agar memahami dan menindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan maupun persoalan yang dihadapi oleh masyarakat terutama dibidang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
4. Diharapkan kepada para OPD mengingat adanya efisiensi anggaran maka diharapkan Pendapatan asli Daerah (PAD) harus lebih ditingkatkan. Setiap rupiah harus betul-betul optimal. Tantangan yang sering dihadapi adalah kepada para pimpinan OPD bahwa program yang direncanakan terlalu banyak, namun dampaknya sangat kecil bagi masyarakat. Penumpukan kegiatan diakhir tahun, belanja belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan real di masyarakat. Pengusulan program-program kedepan, BP3OKP sangat berharap DPR dalam menyampaikan pokok-pokok pikiran (aspirasi) harus mewakili semua unsur termasuk masyarakat, adat dan masyarakat ekonomi bawah. Pokir anggota DPR tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, masyarakat juga harus dilibatkan terutama oleh pemerintah Kabupaten Manokwari.
5. Diharapkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan Papua Barat yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan, serta Pentingnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, berbasis data serta berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, penguatan integrasi perencanaan dan penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah serta peningkatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi hal yang sangat penting guna mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
6. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Se-Tanah Papu untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan berdasarkan kegiatan tersebut.
7. Diharapkan kepada Pimpinan BP3OKP-RI Papua Barat segera menindaklanjuti hasil rapat evaluasi terkait dengan kegiatan asosiasi pertemuan Kepala Daerah di Timika (Papua Tengah).



PENUTUP

Demikian penyampaian Laporan Bulan Mei 2026 untuk Pokja Papua Produktif BP3OKP/BPP-RI Provinsi Papua Barat untuk diketahui dengan harapan adanya respon, petunjuk dan kebijakan lebih lanjut guna pengembangan tugas dan fungsi Pokja Papua Polhukam yang lebih baik serta berimplikasi terhadap program Papua Damai khususnya di Provinsi Papua Barat yang bermartabat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

